



Tantangan, Implikasi, dan Strategi Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Muhamad Zulfan Arief

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Indonesia

Email: mz.arief007@gmail.com

Kata Kunci

Remaja, Wedang
Jahe, Disminore

Abstrak

Ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi isu krusial dalam kerangka desentralisasi di Indonesia. Ketergantungan yang tinggi ini mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berimplikasi pada rendahnya kemandirian fiskal. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami tantangan dan implikasi dari fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan, implikasi, serta strategi penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui telaah kebijakan fiskal, laporan keuangan daerah, serta publikasi akademik terkait desentralisasi fiskal. Analisis dilakukan dengan membandingkan pola ketergantungan fiskal pada daerah dengan tingkat kemandirian yang berbeda untuk menemukan pola umum dan strategi alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal yang berlebihan melemahkan insentif daerah dalam menggali potensi PAD, menciptakan ketidakseimbangan fiskal antarwilayah, serta menimbulkan risiko moral hazard. Namun, transfer pusat tetap berperan penting dalam menjamin pemerataan pembangunan dan penyediaan layanan publik dasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penguatan kemandirian fiskal dapat dilakukan melalui diversifikasi pendapatan, reformasi tata kelola fiskal, peningkatan kapasitas aparatur, serta inovasi kebijakan fiskal lokal. Implikasi penelitian ini menekankan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, melainkan juga strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, daerah diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kualitas pembangunan secara lebih merata.

Kata Kunci: Desentralisasi; Kapasitas Fiskal; Dana Transfer; Kemandirian Daerah; Kebijakan Fiskal

Keywords

Decentralization;
fiscal capacity;
Transfer Funds;
Regional
Independence;
Fiscal Policy

Abstract

Regional fiscal dependence on transfer funds from the central government is still a crucial issue in the framework of decentralization in Indonesia. This high dependence reflects the limited capacity of regional fiscal in exploring the potential of Regional Original Revenue (PAD) and has implications for low fiscal independence. Therefore, a more in-depth analysis is needed to understand the challenges and implications of the phenomenon. This study aims to examine the challenges, implications, and strategies for strengthening regional fiscal capacity in reducing dependence on central transfers. The method used is a qualitative approach with literature studies and descriptive-comparative analysis. Data was obtained through fiscal policy studies, regional financial reports, and academic publications related to fiscal decentralization. The analysis was carried out by comparing patterns of fiscal dependence in regions with different levels of independence to find common patterns and alternative strategies. The results of the study show that excessive fiscal dependence weakens regional incentives to explore the potential of PAD, creates fiscal imbalances between regions, and poses a risk of moral hazard. However, central transfers still play an important role in ensuring equitable distribution of development and the provision of basic public services. This

study concludes that strategies to strengthen fiscal independence can be carried out through income diversification, fiscal governance reform, apparatus capacity building, and local fiscal policy innovation. The implications of this study emphasize that strengthening regional fiscal capacity is not only a technical need, but also a sustainable development strategy. By reducing dependence on central transfers, regions are expected to be able to strengthen fiscal independence and improve the quality of development more evenly.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal telah menjadi tren global dalam sistem tata kelola pemerintahan modern, dengan banyak negara berkembang mengadopsi berbagai bentuk desentralisasi sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi penyediaan barang publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Ali & Saleh, 2020; Azizah et al., 2022; Hanif et al., 2020; Khoirudin & Musta'in, 2020; Slavinskaitė, 2017; Zulyanto, 2012). Namun, implementasi desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang menghadapi tantangan kompleks, termasuk ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat yang dapat melemahkan insentif pemerintah subnasional untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (Ali et al., 2024). Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal memiliki potensi meningkatkan pembangunan ekonomi lokal, tantangan seperti urbanisasi, kemiskinan, ketimpangan, infrastruktur yang tidak memadai, dan isu tata kelola menghambat implementasi yang efektif (Monkam & Mangwana, 2024).

Kondisi spesifik Indonesia menunjukkan permasalahan yang lebih kompleks dalam konteks ketergantungan fiskal daerah. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebesar 68 persen pendapatan daerah masih berasal dari suntikan dana pemerintah pusat, dengan alokasi transfer ke daerah mencapai Rp 857,6 triliun pada APBN 2024 atau meningkat 49 persen dibandingkan tahun 2014 (Alfirman, 2023). Analisis terhadap 508 kabupaten/kota di Indonesia mengungkapkan fakta mengkhawatirkan bahwa hanya 22 kabupaten/kota atau 4,3 persen yang memiliki ketergantungan rendah terhadap transfer pusat (di bawah 50 persen). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam kapasitas fiskal antarwilayah, dengan daerah di luar Jawa-Bali memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi (83 persen) dibandingkan daerah di Jawa-Bali (63,1 persen), bahkan Papua dan Papua Barat mencapai tingkat ketergantungan di atas 90 persen (Kompas, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai ketergantungan fiskal daerah telah menghasilkan temuan penting namun masih memiliki keterbatasan dalam aspek strategis. Ardhani (2021) menemukan bahwa ketergantungan fiskal yang tinggi berdampak pada lemahnya inisiatif pemerintah daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kemandirian fiskal sulit dicapai. Sejalan dengan itu, Saputra dan Susanti (2022) menunjukkan bahwa dana transfer memang berperan penting dalam pemerataan pembangunan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan moral hazard karena daerah cenderung pasif dalam melakukan inovasi fiskal. Sementara itu, studi terbaru oleh Bakri et al. (2024) menganalisis hubungan antara transfer fiskal dan akuntabilitas sebagai katalis pertumbuhan ekonomi regional, namun belum mengkaji secara mendalam strategi penguatan kapasitas fiskal untuk mengurangi ketergantungan. Penelitian lain oleh Digdowiseiso dan Muhammad (2023) melakukan studi literatur mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, namun masih terbatas dalam merumuskan strategi praktis berbasis kondisi lokal Indonesia.

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah berjalan lebih dari dua dekade, namun kemandirian fiskal yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Harapannya, daerah mampu lebih mandiri dalam mengelola keuangannya, tetapi kenyataan menunjukkan ketergantungan pada transfer pusat masih sangat tinggi. Kehadiran Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah bahkan memunculkan kritik baru. Aturan ini dinilai

mendorong resentralisasi karena adanya kebijakan earmarking yang terlalu ketat (ANSHARI, 2017; Diprose, 2023; Lewis, 2023). Kondisi ini menandakan perlunya strategi baru yang lebih peka terhadap keragaman daerah Indonesia—dari yang sudah maju hingga tertinggal, serta perbedaan tantangan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. Tidak hanya mengidentifikasi tantangan dan implikasi ketergantungan fiskal, penelitian ini juga merumuskan strategi praktis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan, reformasi tata kelola, dan inovasi kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan wilayah. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung bersifat teoritis atau deskriptif, penelitian ini mengintegrasikan analisis komparatif antarwilayah dengan tingkat kemandirian fiskal yang berbeda untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diadaptasi. Lebih jauh, penelitian ini juga mengkaji secara kritis peran transfer pusat, bukan semata sebagai instrumen pemerataan, melainkan sebagai pendorong kemandirian fiskal yang tetap menjaga semangat kesatuan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, implikasi, serta strategi penguatan kapasitas fiskal daerah agar lebih mandiri dari transfer pusat. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam literatur desentralisasi fiskal sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh melalui telaah dokumen kebijakan fiskal, laporan keuangan daerah, serta publikasi akademik yang relevan dengan isu desentralisasi fiskal dan ketergantungan daerah terhadap transfer pusat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling dokumen, yaitu hanya memilih literatur dan laporan yang secara langsung membahas dana transfer, kapasitas fiskal, serta kemandirian daerah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan pola ketergantungan fiskal di berbagai daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal berbeda. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori desentralisasi fiskal dengan praktik di lapangan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari regulasi, laporan resmi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan, implikasi, serta strategi penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, baik melalui DAU, DAK, maupun Dana Bagi Hasil. Tingginya kontribusi transfer pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyebabkan kapasitas fiskal daerah cenderung lemah karena minimnya kontribusi PAD. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun transfer pusat berfungsi sebagai instrumen pemerataan, ia sekaligus menimbulkan risiko ketergantungan fiskal yang berkepanjangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ardhani (2021) yang menyatakan bahwa ketergantungan fiskal dapat mengurangi inisiatif daerah dalam menggali potensi PAD secara

optimal. Demikian pula, Saputra dan Susanti (2022) menemukan bahwa daerah yang terlalu bergantung pada transfer pusat menunjukkan tingkat inovasi fiskal yang rendah serta cenderung mengalami moral hazard. Artinya, daerah merasa aman dengan keberadaan transfer pusat sehingga tidak terdorong untuk mengembangkan basis pajak dan retribusi daerah.

Selain tantangan tersebut, penelitian ini juga mengidentifikasi ketidakseimbangan fiskal antarwilayah. Daerah dengan potensi ekonomi tinggi mampu meningkatkan PAD secara signifikan, sementara daerah dengan potensi terbatas semakin terperangkap dalam ketergantungan transfer. Ketimpangan ini dapat memperburuk disparitas pembangunan antarwilayah. Namun, transfer pusat tetap memiliki implikasi positif, yaitu menjamin ketersediaan layanan publik dasar di seluruh daerah, terutama daerah tertinggal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang perlu diterapkan meliputi:

1. Diversifikasi pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak lokal, retribusi, dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Reformasi tata kelola fiskal yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
3. Penguatan kapasitas SDM aparatur dalam manajemen keuangan publik guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran.
4. Inovasi kebijakan fiskal lokal yang berbasis potensi unggulan daerah, sehingga kemandirian fiskal dapat tercapai tanpa mengabaikan peran transfer pusat sebagai instrumen pemerataan.

Dengan strategi tersebut, ketergantungan fiskal dapat dikurangi secara bertahap, dan kapasitas fiskal daerah akan meningkat. Hal ini sejalan dengan gagasan Oates bahwa desentralisasi fiskal yang efektif menuntut daerah untuk memiliki insentif kuat dalam menggali sumber-sumber pendapatan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa kemandirian fiskal bukan hanya isu teknis, tetapi juga strategi pembangunan jangka panjang yang harus didukung oleh reformasi kelembagaan dan tata kelola fiskal yang berkelanjutan

KESIMPULAN

Ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer dana pusat merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kerangka desentralisasi di Indonesia. Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi dapat melemahkan insentif daerah untuk meningkatkan PAD. Oleh karena itu, strategi kemandirian fiskal perlu diarahkan pada diversifikasi pendapatan, perbaikan tata kelola keuangan, serta peningkatan kapasitas fiskal melalui inovasi kebijakan lokal. Dengan demikian, kemandirian fiskal daerah dapat tercapai dan keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjamin. Sebagai saran, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam menggali potensi PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang berbasis potensi lokal. Pemerintah pusat juga disarankan untuk memperkuat kebijakan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan kemandirian fiskalnya, sehingga terjadi dorongan positif untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang keuangan publik agar tata kelola fiskal menjadi lebih transparan, akuntabel, dan inovatif. Upaya kolaboratif antara pusat dan daerah dalam merancang formula transfer yang lebih adil juga penting dilakukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah. Dengan langkah-langkah tersebut, desentralisasi fiskal di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan

berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, D. D. I., & Saleh, S. E. (2020). The effect of fiscal decentralization and economic growth on poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.37479/jej.v1i2.4381>
- Ali, S., Gill, A. R., & Ali, M. (2024). Transformative routes to sustainable development: The nexus between fiscal decentralization and sustainable environment in developing countries. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1177/10704965241295757>
- Alfirman, L. (2023). Regional fiscal management encouraged to be more optimal. *Ministry of Finance Indonesia*.
- Anshari, K. (2017). Indonesia's village fiscal transfers: A fiscal decentralisation review. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 8(3). <https://doi.org/10.18196/jgp.2017.0050.296-326>
- Ardhani, R. (2021). Ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat dan implikasinya terhadap kemandirian daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2657>
- Azizah, N., Kusuma, H., & Arifin, Z. (2022). Does fiscal decentralization increase the economic growth in Sulawesi Island? *Economics Development Analysis Journal*, 11(1). <https://doi.org/10.15294/edaj.v11i1.49957>
- Bakri, M. R., Bagiada, P. P., Yogantari, N. L. R., & Marlina, L. S. (2024). Accountability and fiscal transfer: The perfect duo for enhancing the regional economy. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1), 105–122.
- Digdowiseiso, K., & Muhammad, R. (2023). The impact of fiscal decentralization on economic growth in Indonesia: A literature study. *Journal of Social Science*, 5(3).
- Diprose, R. (2023). Striking the right balance: Winding back Indonesia's 'big bang' decentralization. In *Constitutional democracy in Indonesia*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.003.0005>
- Hanif, I., Wallace, S., & Gago-de-Santos, P. (2020). Economic growth by means of fiscal decentralization: An empirical study for federal developing countries. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968088>
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1). <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Kompas. (2024, April 25). Regional autonomy: Dependence on transfers from the center still high. *Kompas.id*.
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1). <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Monkam, N., & Mangwanya, L. (2024). Digital tools for boosting the impact of fiscal decentralization in Africa's local economies. *Journal of African Development*, 26(1).
- Saputra, A., & Susanti, D. (2022). Pengaruh dana transfer terhadap kemandirian fiskal daerah di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(1), 25–40. <https://doi.org/10.24258/jba.v18i1.1040>

Tantangan, Implikasi, dan Strategi Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Slavinskaitė, N. (2017). Fiscal decentralization and economic growth in selected European countries. *Journal of Business Economics and Management*, 18(4).
<https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1292312>

Zulyanto, A. (2012). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1).
<https://doi.org/10.24036/ecosains.346557.00>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).